



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR: 100.3.3/ 02/ KEP.DPRD/ I/ 2025  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda sebagai instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Memperhatikan : Surat Kesepakatan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 100.3.1.1/ 01/ SKB/DPRD/ 2025 dan Nomor : 100.3.7/ /HKM/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025.


- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Usulan Pemerintah Daerah dan Inisiatif DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang penetapan skala prioritasnya dibahas bersama antara Bapemperda DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan:
- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Rencana Pembangunan Daerah;
  - c. Penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas Pembantuan; dan
  - d. Aspirasi masyarakat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal 15 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
KETUA, 

  
KAHARUDDIN UMAR

Tembusan :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Pimpinan dan anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR : 100.3.3/ 02/ KEP.DPRD/ I/ 2025  
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025.  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2025

**I. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025**

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL/ Ket.
<b>MASA SIDANG II</b>		
<b>3 RAPERDA INISIATIF DPRD dan 2 PERDA PERUBAHAN :</b>		
1.	<b>Raperda Tentang</b> Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	Inisiatif DPRD
2.	<b>Raperda Tentang</b> Bantuan Keuangan Partai Politik	Inisiatif DPRD
3.	<b>Raperda Tentang</b> Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	Inisiatif DPRD
4.	<b>Raperda Tentang</b> Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Perda Perubahan
5.	<b>Raperda Tentang</b> Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT. Bank NTB Syari'ah	Perda Perubahan
<b>MASA SIDANG II</b>		
<b>6 RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH :</b>		
1.	<b>Raperda Tentang</b> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029	Pemerintah Daerah
2.	<b>Raperda Tentang</b> Pencabutan Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Perkotaan Taliwang 2015- 2035	Pemerintah Daerah
3.	<b>Raperda Tentang</b> Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024- 2044	Pemerintah Daerah
4.	<b>Raperda Tentang</b> Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pemerintah Daerah

5.	<b>Raperda Tentang</b> Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah.	Pemerintah Daerah
6.	<b>Raperda Tentang</b> Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT. Bank NTB Syari'ah	Pemerintah Daerah
<b>MASA SIDANG III</b>		
<b>5 RAPERDA INISIATIF DPRD :</b>		
1.	<b>Raperda Tentang</b> Penyelenggaraan Perhubungan	Inisiatif DPRD
2.	<b>Raperda Tentang</b> Penyelenggaraan Jalan	Inisiatif DPRD
3.	<b>Raperda Tentang</b> Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Inisiatif DPRD
4.	<b>Raperda Tentang</b> Tata Kelola Pemerintahan Desa	Inisiatif DPRD
5.	<b>Raperda Tentang</b> Penyelenggaraan Smart City	Inisiatif DPRD
<b>MASA SIDANG III</b>		
<b>6 RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH :</b>		
1.	<b>Raperda Tentang</b> Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Pemerintah Daerah
2.	<b>Raperda Tentang</b> Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	Pemerintah Daerah
3.	<b>Raperda Tentang</b> Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Daerah
4.	<b>Raperda Tentang</b> Perizinan dan Non Perizinan di Daerah	Pemerintah Daerah
5.	<b>Raperda Tentang</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah Daerah
6.	<b>Raperda Tentang</b> Kesejahteraan Lansia	Pemerintah Daerah
<b>MASA SIDANG I</b>		
<b>13 RAPERDA INISIATIF DPRD :</b>		
1.	<b>Raperda Tentang</b> Karang Taruna	Inisiatif DPRD
2.	<b>Raperda Tentang</b> Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan UMKM	Inisiatif DPRD

3.	<b>Raperda Tentang</b> Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Inisiatif DPRD
4.	<b>Raperda Tentang</b> Sekolah Penggerak	Inisiatif DPRD
5.	<b>Raperda Tentang</b> Pengelolaan Pasar Rakyat	Inisiatif DPRD
6.	<b>Raperda Tentang</b> Perlindungan Usaha Kecil dan Sektor Informal	Inisiatif DPRD
7.	<b>Raperda Tentang</b> Pengelolaan Aset Desa	Inisiatif DPRD
8.	<b>Raperda Tentang</b> Jalan	Inisiatif DPRD
9.	<b>Raperda Tentang</b> Pengarusutamaan Gender	Inisiatif DPRD
10.	<b>Raperda Tentang</b> Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	Inisiatif DPRD
11.	<b>Raperda Tentang</b> Penanggulangan Penyakit Menular	Inisiatif DPRD
12.	<b>Raperda Tentang</b> Pendewasaan Usia Perkawinan	Inisiatif DPRD
13.	<b>Raperda Tentang</b> Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat	Inisiatif DPRD

#### **MASA SIDANG I**


#### **4 RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH :**

1	<b>Raperda Tentang</b> Pelaporan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Pemerintah Daerah
2	<b>Raperda Tentang</b> Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah	Pemerintah Daerah
3	<b>Raperda Tentang</b> Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pemerintah Daerah
4	<b>Raperda Tentang</b> Penataan Toko Modern	Pemerintah Daerah

**II. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA**

1.	<b>Raperda Tentang</b> Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
2.	<b>Raperda Tentang</b> Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
3.	<b>Raperda Tentang</b> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
KETUA, ✓

  
**KAHARUDDIN UMAR**